



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dijadikan acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
A.1. Informasi tentang Profil Kemen PPPA						
1.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap dan kontak serta tugas dan fungsi	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
2.	Struktur organisasi dan profil singkat unit kerja serta pejabat struktural	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
3.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diterbitkan Tambahan Berita Negara	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
4.	Daftar wajib lapor LHKPN Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
A.2. Informasi tentang Program/Kegiatan/Kinerja yang Sedang Dijalankan di Lingkungan Kemen PPPA						
5.	Program di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
6.	Informasi pengumuman lelang	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
7.	Daftar pengumuman pemenang lelang secara eletronik	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
8.	Informasi mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
9.	Informasi mengenai program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
10.	Pengumuman rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
11.	Daftar nama yang dinyatakan lulus tes kompetensi dasar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
12.	Laporan pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap ada kegiatan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
13.	Informasi pegawai yang menerima penghargaan	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap Tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
14.	Jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
15.	Program pengembangan sumber daya manusia Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
16.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
17.	Laporan Keuangan Kemen PPPA	Biro Perencanaan dan Keuangan	Menteri PPPA	Triwulan/	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
				semester/tahunan, Jakarta		
18.	Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Kementerian	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Triwulan/ semester/tahunan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
19.	Laporan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemen PPPA dan Sekretariat Kementerian	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kemen PPPA	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
20.	Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran (EKA) Kemen PPPA dan Sekretariat Kementerian	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kemen PPPA	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
21.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemen PPPA	Biro Perencanaan dan Keuangan	Menteri PPPA	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
22.	LAKIP Sekretariat Kementerian	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kementerian	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
23.	Rencana Kerja Kemen PPPA	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
24.	Rencana Kerja Sekretariat Kementerian	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
25.	Rencana Strategis Kemen PPPA	Biro Perencanaan dan Keuangan	Menteri PPPA	Setiap 5 tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
26.	Rencana Strategis Sekretariat Kementerian	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kemen PPPA	Setiap 5 tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
27.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
28.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
29.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemen PPPA Tahun 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
30.	Realisasi Anggaran	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
31.	Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
32.	Data agregat Sistem Informasi <i>Online</i> Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
33.	Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
34.	Profil Anak Indonesia	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
35.	Profil Perempuan Indonesia	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
36.	Publikasi Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
37.	Peta sebaran data gender dan anak	Biro Data dan Informasi	Kepala Biro Data dan Informasi	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
38.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Inspektorat	Inspektur	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
39.	Perjanjian Kinerja Inspektur	Inspektorat	Inspektur	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
40.	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Inspektorat	Inspektur	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
41.	Daftar laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)	Inspektorat	Inspektur	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
42.	Pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara atas LHKPN yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Inspektur	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
43.	Laporan Kinerja Inspektorat 2022	Inspektorat	Inspektur	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
44.	Jumlah permohonan yang diterima, dikabulkan (sebagian atau seluruhnya), dan ditolak (beserta alasan penolakan), serta waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
45.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
46.	Capaian program (<i>one kit for all</i>) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
47.	Capaian program (Sekolah Ramah Anak (SRA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), Pusat Kreativitas	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Anak (PKA), dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan		atas Kesehatan dan Pendidikan			
48.	Profil Tematik Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
49.	Informasi tentang kedudukan atau domisili dan tugas fungsi Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
50.	Struktur organisasi, gambaran umum setiap asisten deputi, dan profil singkat pejabat struktural	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
51.	Daftar wajib lapor LHKPN/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pejabat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
52.	Informasi pengumuman lelang	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
53.	Laporan kinerja tahunan Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
54.	Laporan keuangan yang sudah diaudit	Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
55.	Data kepegawaian Deputy Bidang Pemenuhan Anak	Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
56.	Informasi tentang Daftar Program Penyusunan Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
57.	Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
58.	Informasi tentang tugas dan fungsi Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan beserta keasdepan yang ada di dalamnya	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
59.	Struktur organisasi Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
60.	LAKIP Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap Tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
61.	Laporan keuangan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
62.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) 5 Tahunan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
63.	Laporan BMN Tahunan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
64.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
65.	Informasi tentang Daftar Program Penyusunan Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
66.	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang disusun oleh Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
67.	Data jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik, dan situasi darurat kondisi khusus, termasuk kekerasan berbasis gender <i>online</i> melalui SIMFONI PPA	Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
68.	Informasi tentang jumlah layanan tindak lanjut yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan melalui Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129	Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Setiap bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
69.	Informasi tentang jumlah kasus perempuan korban kekerasan berdasarkan status penanganan	Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Setiap bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
70.	Informasi tentang jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan melalui SAPA 129	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Setiap bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
A.3. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik						
71.	Jumlah permohonan yang diterima, dikabulkan (sebagian atau seluruhnya), dan ditolak (beserta alasan penolakan), serta waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
72.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
A.4. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan						
73.	Daftar peraturan perundang-undangan, instrumen hukum lainnya, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1.	<i>Hotline SAPA 129</i>	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan dan Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1.	Informasi nomenklatur organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
2.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Kemen PPPA	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
3.	Petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Kemen PPPA	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
4.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Biro Perencanaan dan Keuangan	Menteri PPPA	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
5.	Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2020-2024	Inspektorat	Inspektur	Setiap 5 tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
6.	Rencana Tindak Lanjut <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penguatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Inspektorat	Inspektur	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
7.	Perjanjian Kerja Sama dengan 8 Kementerian/ Lembaga Lainnya tentang Tim Gabungan Penilai Angka Kredit Auditor	Inspektorat	Inspektur	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
8.	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan intern	Inspektorat	Inspektur	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
9.	Dokumen pendukung seperti naskah akademik, konsepsi, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, instrumen hukum lainnya, atau kebijakan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
10.	Risalah/notula rapat dari proses pembentukan peraturan, instrumen hukum lainnya, atau kebijakan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
11.	Peraturan, instrumen hukum lainnya, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
12.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme					
13.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sinergi Advokasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Tindak Pidana	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
14.	Nota Kesepahaman antara Sekretaris Kementerian PPPA dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
15.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
16.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kemen PPPA tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender Melalui Pembiayaan Ultra Mikro	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
17.	Nota Kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dan Kemen PPPA tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
18.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Tahun 2019-2024 dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024					
19.	Perjanjian Kerja sama antara Kemen PPPA dan <i>Microsave</i> Indonesia <i>Consulting</i> tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
20.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Bidang Perpustakaan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
21.	Kesepakatan Bersama Antara Kemen PPPA dan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia					
22.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
23.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Universitas Udayana tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
24.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dan Universitas Gadjah Mada tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
25.	Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kemen PPPA tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
26.	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Sekretariat Kementerian Kemen PPPA tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
27.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kemen PPPA dengan PT Grab Teknologi Indonesia tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan PPPA	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
28.	Nota Kesepahaman antara Sekretaris Kementerian dengan Direktorat	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian					
29.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kemen PPPA dengan Indonesia <i>Businesss Coalition for Women Empowerment</i> tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender dalam Dunia Kerja	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
30.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Perpustakaan Nasional tentang Sinergi Pengembangan Perpustakaan yang Responsif Gender dan Ramah Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
31.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Program Pembangunan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana					
32.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dengan Tanoto <i>Foundation</i> tentang Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
33.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan PT. Huawei <i>Tech Investment</i> tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menuju Transformasi Digital yang Responsif Gender dan Ramah Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
34.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
35.	<i>G20 Empower Playbook</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
36.	<i>Hasil Rapat 2nd ASEAN Women Leaders Summit</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
37.	<i>Hasil Kegiatan The 7th ASEAN Children's Forum</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
38.	<i>Pernyataan Pimpinan Rapat pada The 2022 APEC Women and The Economy Forum</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
39.	<i>Hasil Rapat Kerja Teknis antara Kemen PPPA dan Do Run Do Run</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
40.	<i>Pernyataan bersama ASEAN-US Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women's Empowerment</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
41.	<i>Hasil Audiensi Menteri PPPA dengan Komisioner Uni Eropa</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
42.	<i>Hasil Audiensi Menteri PPPA dengan Menteri Urusan Wanita Inggris Raya dan Irlandia Utara</i>	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
43.	Hasil Audiensi Menteri PPPA dengan Menteri untuk Perempuan Australia	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
44.	Hasil Audiensi Menteri PPPA dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
45.	Hasil Audiensi Menteri PPPA dengan Menteri untuk Perempuan dan Pembangunan Anak India	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
46.	Hasil Audiensi Menteri PPPA dengan Menteri Negara untuk Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
47.	Hasil Audiensi dengan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
48.	Memorandum Saling Pengertian antara Kemen PPPA dengan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Republik Singapura terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembangunan Keluarga	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
49.	<i>Memorandum of Understanding</i> antara Kemen PPPA dengan Kementerian	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2013, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Perempuan, Anak, dan Penanggulangan Kemiskinan Republik Fiji tentang Pemberdayaan Perempuan, Kesenjangan Gender dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak					
50.	Nota Kesepahaman Antara Kemen PPPA dan Universitas Padjadjaran tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
51.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
52.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Majelis Ulama Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
53.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kemen PPPA tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
54.	Kesepakatan Bersama antara Menteri PPPA dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
55.	Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
56.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
57.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip
58.	Pedoman Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Daerah	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
59.	Kajian Kebijakan tentang Lembaga Pengasuhan Alternatif Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
60.	Kajian Kebijakan Infrastruktur Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
61.	Rekomendasi Kebijakan tentang Pemberian Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Unit Layanan di Daerah	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
62.	Kajian Kebijakan tentang Standarisasi Ramah Anak di Rumah Ibadah	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
63.	Pedoman Gereja Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
64.	Pedoman Gereja Katholik Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
65.	Pedoman Pura Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
66.	Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak yang ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak di Daerah	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
67.	Profil Tematik Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
68.	Infografis Profil Tematik Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
69.	Surat Edaran Bersama 3 Menteri (Menteri PPPA, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2016, Jakarta	<i>Softcopy</i> (Website KLA)	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
70.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Penerapan Klenteng Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (Website KLA)	Sesuai dengan retensi arsip
71.	Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah Melalui Penerapan Vihara Ramah Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (Website KLA)	Sesuai dengan retensi arsip
72.	Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip
73.	Keputusan Menteri PPPA Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
74.	Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip
75.	Pedoman Teknis Pembentukan Gugus Tugas, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan Profil Tematik Kabupaten/Kota Layak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip
76.	Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (JDIH)	Sesuai dengan retensi arsip
77.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (Website KLA)	Sesuai dengan retensi arsip
78.	Jumlah <i>daycare</i> ramah anak yang terstandar menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	Sesuai dengan retensi arsip
79.	Daftar <i>daycare</i> yang terstandar menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Pengasuhan dan Lingkungan			
80.	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	Sesuai dengan retensi arsip
81.	Jumlah PUSPAGA yang terstandar menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	Sesuai dengan retensi arsip
82.	Daftar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terstandar menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	Sesuai dengan retensi arsip
83.	Daftar Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandar menurut peringkat sertifikasi	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	Sesuai dengan retensi arsip
84.	Daftar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) (infografis, materi publikasi, <i>e-learning</i> , dll) Asisten Deputi	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2021-2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Tahun 2021-2022		atas Pengasuhan dan Lingkungan			
85.	Alamat dan kontak PUSPAGA Tahun 2021	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
86.	Jumlah dan daftar Satuan Pendidikan Ramah Anak menurut wilayah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	1 tahun
87.	Jumlah dan daftar Pusat Kreativitas Anak menurut wilayah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	1 tahun
88.	Jumlah dan daftar Rumah Ibadah Ramah Anak menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	1 tahun
89.	Jumlah dan daftar fasilitator nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> (SIGA)	1 tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
90.	Jumlah satuan pendidikan ramah anak yang terstandar menurut wilayah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2022, Jakarta	<i>Softcopy (SIGA)</i>	1 tahun
91.	Jumlah dan daftar pelayanan ramah anak di Puskesmas menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2023, Jakarta	<i>Softcopy (SIGA)</i>	1 tahun
92.	Jumlah dan daftar Kampung Anak Sejahtera menurut wilayah dan tahun	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
93.	Video KIE Pencegahan <i>Stunting</i>	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Desember 2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
94.	Video Lagu “Sekolah Ramah Anak”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
95.	Video Lagu “Mars Ramah Anak”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
96.	Video Lagu “SRA Song”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
97.	Video Lagu “Sekolah BARIISAN”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
98.	Video “Gebyar Video Permainan Tradisional Anak Indonesia”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
99.	Infografis “Aku Ibadah di Rumah Bersama Keluarga”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
100.	Buku Aktivitas “Yuk Main Permainan Tradisional Volume 1”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
101.	Infografis “Gembira Beribadah di Rumah Bersama Ayah dan Ibu”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
102.	Infografis “Patuhi Protokol Kesehatan dalam Keluarga”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
103.	Infografis “Protokol Kesehatan dalam Keluarga”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
104.	Buku “Aku Bisa Lawan Covid-19”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
105.	Buku “Gembira Belajar di Rumah”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
106.	<i>Booklet</i> “Stop Bullying”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
107.	<i>Leaflet</i> “Gembira Belajar di Rumah”	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
108.	Karya Cover Lagu SRA	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2021, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
109.	Video Rumah Ibadah Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2022, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
110.	Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2021, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
111.	Pedoman Pusat Kreativitas Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
112.	Pedoman Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2022, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
113.	Pedoman Kanmpung Anak Sejahtera	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip
114.	Infografis Poster Digital Yuk Kenali Rumus Satuan Pendidikan Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	2020, Jakarta	<i>Softcopy (Website KLA)</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
115.	Infografis Poster Digital Kuatkan Layanan Puskesmas Ramah Anak Cegah <i>Stunting</i>	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Desember 2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
116.	Karya Foto Pemenang <i>Challenge</i> Hari Gizi Nasional 2022	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
117.	Karya Poster Pemenang <i>Challenge</i> Hari Gizi Nasional 2022	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
118.	Karya Video Pemenang <i>Challenge</i> Hari Gizi Nasional 2022	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
119.	Infografis Post Feed Instagram Yuk Kenali Rumus Satuan Pendidikan Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak	Januari 2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			atas Kesehatan dan Pendidikan			
120.	Infografis <i>Post Feed</i> Instagram Kuatkan Layanan Puskesmas Ramah Anak Cegah Stunting	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	Januari 2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
121.	Video KIE Pusat Informasi Sahabat Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
122.	Media/Majalah Forum Anak (MALFORA)	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Setiap 4 bulan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
123.	Suara Anak Indonesia Tahun 2021	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
124.	DAFA <i>Award</i> Tahun 2021	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
			Informasi, dan Partisipasi Anak			
125.	Data Forum Anak Tahun 2021	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
126.	Pusat Informasi Sahabat Anak yang terstandar tahun 2021	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
127.	SDM yang Tersertifikasi Ramah Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
128.	Daftar KIE Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak (infografis dan <i>e-learning</i>)	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
129.	Pedoman Hari Anak Nasional Tahun 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
130.	Laporan Kinerja Tahun 2022 Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	2022, Jakarta	Softcopy	Sesuai dengan retensi arsip
131.	Laporan Kinerja Tahun 2023 Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	2023, Jakarta	Softcopy	Sesuai dengan retensi arsip
132.	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2023, Jakarta	Softcopy	Sesuai dengan retensi arsip
133.	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2024, Jakarta	Softcopy	Sesuai dengan retensi arsip
134.	Keputusan Menteri PPPA Nomor 118 Tahun 2024 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
135.	Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak <i>Audited</i> Tahun 2023	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
136.	Catatan atas Laporan BMN Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak <i>Audited</i> Tahun 2024	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
137.	Data kepegawaian Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
138.	SPTJM dan Program Penyusunan Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2024	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
139.	Informasi tentang usulan penyusunan Program Penyusunan Tahun 2024	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
140.	Penyampaian Usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Jangka Menengah Tahun 2025-2029	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
141.	Surat Edaran Bersama (Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
142.	Sebuah Studi Dasar: Pengetahuan dan Perilaku <i>Online</i> Orang Tua dan Anak di Indonesia 2023	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> (<i>Website</i> Kemen PPPA)	10 tahun
143.	Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2018-2021	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2018; 2019; 2020; dan 2021, Jakarta	<i>Softcopy</i> (<i>Website</i> Kemen PPPA)	10 tahun
144.	Modul Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bekerja sama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama: Buku Pengantar Berdaya	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i> (<i>Website</i> Kemen PPPA)	10 tahun



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
	Bersama PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak					
145.	Modul PATBM bekerja sama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama: Modul 1 Berdaya Melindungi Anak Indonesia (Peningkatan Kapasitas Bersama Pengurus PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i> (<i>Website</i> Kemen PPPA)	10 tahun
146.	Modul PATBM bekerja sama dengan Yayasan Rumah Kita Bersama: Modul 2 Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak dan Kaum Muda Bersama PATBM) Untuk Pencegahan Perkawinan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i> (<i>Website</i> Kemen PPPA)	10 tahun
147.	Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19 (Kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia)	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i> (<i>Website</i> Kemen PPPA)	10 tahun
148.	Data anak penyandang disabilitas berdasarkan riset kesehatan dasar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak c.q. Asisten Deputi	Kementerian Kesehatan	2018, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
		Perlindungan Anak Kondisi Khusus				
149.	Buku “Menemukenali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas (Panduan Dasar untuk Orang Tua, Keluarga dan Pendamping)”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
150.	Buku “Mengenal Gangguan Psikososial Pada Anak”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
151.	Buku “Panduan Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2019, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
152.	Buku “Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik”	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
153.	Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
154.	Pedoman Pengukuran Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
155.	Protokol Pengasuhan Bagi Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Anak Dengan Orang Tua/Pengasuh/Wali Berstatus Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Orang Tua yang Meninggal Karena Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
156.	Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
157.	Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
158.	Protokol Perlindungan Khusus Bagi Pengungsi Anak dan Pengungsi Anak dari Luar Negeri	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
159.	Infografis Data Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tahun 2022	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tahun 2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
160.	Infografis Data Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tahun 2023	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tahun 2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
161.	Infografis Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tahun 2024, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
162.	<i>Pamflet</i> SAPA 129	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tahun 2023, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai retensi arsip
163.	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun Tahun Anggaran 2020-2024	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
164.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
165.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
166.	Daftar informasi publik Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
167.	Data kepegawaian Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
168.	LAKIP Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
169.	Dokumentasi pendukung seperti naskah akademik, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya kebijakan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
170.	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Setiap ada perubahan, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
171.	<i>Leaflet</i> tentang Kondisi Perempuan Indonesia Tahun 2021 (Hasil SPHPN Tahun 2021)	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	2022, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
172.	Buku Pintar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
		Perlindungan Hak Perempuan	Perlindungan Hak Perempuan			
173.	<i>Booklet</i> dan <i>leaflet</i> terkait Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	2023, Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
174.	Informasi tentang perempuan dalam bencana (Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
175.	Informasi tentang perempuan dalam konflik (Sekretariat Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS))	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
176.	Komik “Katakan Tidak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
		Rumah Tangga dan Rentan	Rumah Tangga dan Rentan			
177.	Laporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014-2023	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Februari 2024,	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
178.	Panduan/Tutorial Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Mei 2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
179.	Modul Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Komprehensif	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	Desember 2020, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip
180.	Informasi tentang program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Pekerja dan	Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Pekerja dan Tindak	2021, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
		Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pidana Perdagangan Orang			
181.	Informasi alur pengaduan kasus	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	Sesuai dengan retensi arsip

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Hasil evaluasi Kota/ Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sedang dalam proses penilaian	- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak - Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	Mengganggu proses penilaian oleh Tim Independen	Penilaian dilaksanakan dengan objektif dan sesuai dengan prosedur yang ada	Hasil evaluasi dapat dipublikasikan setelah penghargaan KLA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
2.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Data korban maupun pelaku anak (radikalisme dan terorisme)	• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Membahayakan keamanan/ keselamatan anak	Identitas anak tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan anak terjamin	Selama berlaku
3.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Data/Identitas Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang menjadi korban pandemi Covid-19 dan anak yang kehilangan orangtua akibat pandemi Covid-19	• Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Pasal 64 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian	Membahayakan anak	Identitas anak tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan anak terjamin.	Selama berlaku



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
4.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Informasi tentang identitas korban	- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban - Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Layanan Rujukan Akhir Perempuan Korban Kekerasan	Membahayakan keamanan/ keselamatan korban	Identitas korban tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan korban terjamin	Selama berlaku
5.	Kepala Biro Data dan Informasi	Data identitas korban kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 19)	Membahayakan korban	Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak	Sampai tidak terbatas



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012			
6.	Kepala Biro Data dan Informasi	Laporan pengaduan dan penyidikan korban kekerasan	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO	Membahayakan korban	Melindungi korban kekerasan, melindungi korban dari stigmatisasi, dan melindungi tumbuh kembang anak	Sampai tidak terbatas
7.	Inspektur	Laporan Hasil Pengawasan Internal (LHP), termasuk LH	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur	Selama berlaku



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
		Audit; LH <i>Review</i> , LH Pemantauan; LH Evaluasi dan Hasil Pengawasan lainnya				
8.	Inspektur	Dokumen Pengawasan termasuk Kertas Kerja Pengawasan (KKP)	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Identitas pelaku tetap terahasiakan sehingga proses bisa berjalan sesuai prosedur	Selama berlaku
9.	Inspektur	Laporan/pengaduan atas dugaan penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur	Selama berlaku

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI